

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- A.A Navis, 1984, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafitipes, Jakarta
- Amir M.S., 2011, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Citra Harta Prima, Jakarta.
- Ansari Siegar, 2011, *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Bushar Muhammad, 2003, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, cet. 12, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, 2019, *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi.
- Helmi Panuh, 2012, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan Di Sumatera Barat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hermayulis, 1997, *Penerapan Hukum Pertanahan dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat*, Disertasi SP3 UI, Jakarta.
- Idrus Hakimi, 1997, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, cet. 7, Andi Offset, Bandung.
- Imam Sudiyat, 1981, *Hak Adat Sketsa Azas*, Liberty, Yogyakarta.
- Koesnoe H.M., 2000, *Prinsip-Prinsip Hukum Adat tentang Tanah*, Ubaya Press, Surabaya.
- M. Narson, 1971, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Moh Koesnoe dalam Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Tsuyoshi Kato, 2005, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Van Dijk, 1982, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (terjemahan A. Soehardi), Sumur Bandung, Bandung.

Van Vollenhoven dalam Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.

Yaswirman, 2006, *Hukum Keluarga Adat dan Islam (Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, Universitas Andalas, Padang.

Yulfian Azrial, 2003, *Budaya Alam Minangkabau*, Angkasa Raya, Padang.

B. Jurnal, Makalah dan Artikel Hukum

Fitrah Akbar Citrawan, 2020, *Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 3, 2020.

Jonaidi, 2018, *Kajian Hukum Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 6, No. 1, 2018.

Siti Raga Fatmi, 2018, *Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik*, Jurnal Lentera Hukum, Vol. 5, No. 3, 2018.

Penelitian Hukum Adat oleh Mahkamah Agung di Wilayah Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tahun 1980.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

